

ANALISIS RENCANA STRATEGI PEMBANGUNAN KAMPUNG (RESPEK) TERHADAP KINERJA KAMPUNG (STUDI PADA KAMPUNG ASEY KECIL DISTRIK SENTANI TIMUR KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA)

Daniel Dawan¹
danieldawan59@gmail.com

¹ Dosen Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih

Abstraksi:

Penelitian ini bertujuan 1). Memahami peran masing-masing komponen kampung dalam pelaksanaan Rencana Strategi Pembangunan Kampung (Respek) di Kampung Asey Kecil Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. 2). Memahami hakekat dari masing-masing komponen kampung terhadap implementasi program Rencana Strategi Pembangunan Kampung (RESPEK), di Kampung Asey Kecil Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Provinsi Papua. 3). Untuk mengetahui apakah Rencana Strategi Pembangunan Kampung (RESPEK), memberikan perubahan melalui kinerja kampung. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Lokasi penelitian pada Kampung Asey Kecil Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Analisis Rencana Strategi Pembangunan Kampung (RESPEK), telah memberikan dampak nyata terhadap pembangunan kampung, khususnya Kampung Asey Kecil, baik dari segi sarana prasarana (pendidikan, pelayanan kesehatan), infrastruktur (pembuatan bak air bersih, listrik, jalan, MK serta peningkatan makanan dan gizi). Keberhasilan RESPEK tidak terlepas dari strategi pembangunan yang diterapkan diantaranya adalah Pendekatan Budaya Lokal, Pendekatan Strategi Partnership serta Pendekatan Partisipatory dengan adanya pendekatan tersebut mampu menjawab persoalan pembangunan kampung, dan telah memberikan dampak nyata terhadap pembangunan kampung. Komponen kampung sangat berperan serta dalam program pembangunan kampung, yang dicanangkan Pemerintah Daerah Provinsi Papua sesuai dengan Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 serta Undang-undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 bagi Provinsi Papua yang memberikan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Kota dan Kabupaten serta masyarakat dapat mengatur dan mengurus dirinya sendiri.

Kata Kunci : Rencana Strategi Pembangunan Kampung, Kinerja Komponen Kampung, Implementasi Program Pembangunan, Pendekatan Budaya Lokal, Pendekatan Strategi Pembangunan serta Pendekatan Partisipatory.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini secara empiris sebelum pelaksanaan Rencana Strategi Pembangunan Kampung (RESPEK), disebabkan karena tidak menerapkan strategi pembangunan : pendekatan budaya lokal, strategi partnership serta pendekatan partisipatory serta juga belum sinkronisasi antara kedua kepemimpinan formal (Kepala Kampung) dan informal (*Ondoafi*) kampung-kampung, formal yang dimaksudkan adalah pemimpin yang diangkat oleh pemerintah sesuai dengan Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang tata pemerintahan kampung. Permasalahan pembangunan masyarakat kampung di Papua semakin mengemuka sejalan dengan makin banyaknya pemberitaan tentang berbagai persoalan yang terjadi seperti merebaknya konflik social di beberapa tempat yang dipicu berbagai ketimpangan social dalam pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi : pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur. Salah satunya fenomena nyata yang hampir terjadi diberbagai kampung di daerah sentani secara khusus kampung Asey Kecil.

Permasalahan yang dihadapi masyarakat kampung asey kecil adalah dalam merencanakan suatu program kerja kampung masyarakat belum sepenuhnya melibatkan diri dalam proses perencanaan program karena minimnya pengetahuan. Pemukiman warga yang berada disepanjang jalan raya sentani abepura secara khusus RW 04 (jembatan dua) dan RW 02 (telaga maya) perlu direnovasi. Pendidikan dalam hal ini gedung Sekolah Dasar Negeri Impres Kleublou kurang diperhatikan karena sarana prasarana yang dimiliki sekolah kurang memadai diantaranya adalah : pagar sekolah tidak ada, ruang guru tidak ada sementara menggunakan ruang perpustakaan, perpustakaan tidak ada, ruang kelas lantainya rusak, meja gurupun + bangku tidak ada dan meja siswa + bangku siswa sebagian rusak. Kebersihan dan keindahan kampung kurang diperhatikan. Pembenahan Kantor Pemerintahan Kampung perlu direnovasi karena letaknya sangat strategis.

Mengapa dikatakan demikian karena dengan adanya strategi pembangunan : pendekatan budaya lokal, strategi partnership, pendekatan partisipatory serta adanya kebersamaan dalam dualisme kepemimpinan baik formal (kepala kampung) maupun informal (*ondoafi*) akan sangat memberikan dampak nyata pada pembangunan kampung. Karena didalam pembangunan kampung baik pemerintah, swasta, komponen kampung (Kepala kampung, *Ondoafi* ,tim pendamping RESPEK tingkat kabupaten, tim pendamping RESPEK tingkat distrik, penanggung jawab RESPEK tingkat distrik, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda serta perwakilan masyarakat) yang berkompeten, terlibat langsung dalam proses pembangunan kampung.

Kegagalan program pembangunan kampung dimasa lalu disebabkan karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan tidak melibatkan komponen kampung. Proses pembangunan lebih mengedepankan paradigma politik sentralisasi dan dominannya peranan negara pada arus utama kehidupan masyarakat. Mengapa dikatakan demikian, karena kampung memegang peranan yang sangat strategis dalam proses pembangunan nasional, rakyat Indonesia sebagian besar tinggal di kampung-kampung.

Dari fenomena empiric dilapangan, beberapa pelajaran yang dapat di petik adalah adanya realitas keberagaman sosio kultural geografis di Papua yang tinggi, sehingga menghendaki pendekatan ke tata pemerintahan spesifik disetiap kawasan. Selain itu persoalan umum yang harus dihadapi seperti dinamisasi kelembagaan, penyelesaian konflik otoritas, peningkatan kualitas SDM, keterlibatan komponen kampung dalam proses pembangunan kampung dan penerapan strategi pembangunan, pendekatan budaya local, strategi partnership, pendekatan partisipatori. Sehingga Rencana Strategi Pembangunan Kampung (RESPEK) yang dicanangkan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dapat dinikmati oleh masyarakat kampung.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah pokok sebagai berikut :

- a) Bagaimana peran dari masing-masing komponen kampung dalam aktifitas Rencana Strategi Pembangunan Kampung (RESPEK), di Kampung Asey Kecil Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Provinsi Papua.
- b) Bagaimana Pemerintah melibatkan komponen kampung serta penerapan pendekatan budaya lokal, strategi partnership, pendekatan partisipatori dalam Rencana Strategi Pembangunan Kampung (RESPEK), di Kampung Asey Kecil Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Provinsi Papua.
- c) Apakah Analisis Rencana Strategi Pembangunan Kampung (RESPEK) dapat meningkatkan pembangunan kampung dan kesejahteraan masyarakat kampung, di Kampung Asey Kecil Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Provinsi Papua.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan yang akan dikemukakan adalah :

- a) Memahami peran masing-masing komponen kampung dalam pelaksanaan Rencana Strategi Pembangunan Kampung (RESPEK) di Kampung Asey Kecil Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura.
- b) Memahami hakekat dari masing-masing komponen kampung , terhadap implementasi program Rencana Strategi Pembangunan Kampung (RESPEK), di Kampung Asey Kecil Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Papua
- c) Untuk mengetahui apakah Rencana Strategi Pembangunan Kampung (RESPEK) memberikan perubahan melalui kinerja kampung.

METODELOGI PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Menurut Bungin (2009:44) disebutkan bahwa fenomenologi pada dasarnya berpandangan bahwa apa yang nampak di permukaan termasuk pola perilaku manusia sehari-hari hanyalah fenomena dari apa yang tersembunyi di kepala sang pelaku. Realitas bersifat subyektif tergantung pada persepsi, pemahaman, pengertian dan anggapan-anggapan seseorang. Oleh karena itu penghayatan sangat diperlukan untuk memahami berbagai rupa fenomena sehari-hari.

2. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah format deskriptif, dimana format ini dominan menggunakan paradigma fenomenologi dan lebih banyak dipengaruhi oleh paradigma positivistic. Format desain deskriptif kualitatif banyak memiliki kesamaan dengan desain kuantitatif sehingga dapat disebut sebagai desain kualitatif semu. Sebab bentuknya masih dipengaruhi oleh tradisi kuantitatif terutama dalam menempatkan teori pada data yang diperolehnya. Format desain kualitatif, merupakan upaya pendekatan induktif terhadap seluruh proses penelitian karena itu, format desainnya secara total berbeda dengan format penelitian kuantitatif maupun deskriptif kualitatif. Format desain ini lebih banyak mengkonstruksi format penelitian strategi guna memperoleh data dari lapangan secara induktif.

3. Penelitian Fenomenologi

Penelitian fenomenologi berorientasi untuk memahami, menggali dan menafsirkan arti dari peristiwa-peristiwa, fenomena-fenomena yang berhubungan dengan orang-orang yang biasa dalam situasi tertentu. Yang biasa disebut dengan Penelitian Kualitatif dengan menggunakan pengamatan terhadap fenomena atau gejala-gejala social yang alamiah (nature), digunakan sebagai data, pendekatan ini berdasarkan kenyataan lapangan (empiris). Menurut Bogdan dan Biklen (1982) dalam Asmadi Alsa (2003) penelitian dengan pendekatan fenomenologi berusaha memahami makna dari suatu peristiwa atau fenomena yang saling berpengaruh dengan manusia dalam situasi eka tertentu.

4. Lokasi Penelitian

Efektifitas dan efisiensi penelitian ini, akan dikonsentrasikan pada Kampung Asey Kecil yang berdomisili Kabupaten Jayapura Distrik Sentani Timur, yang merupakan kampung pilihan karena telah teregistrasi dan mendapatkan bantuan dana RESPEK. Penelitian ini diarahkan untuk melihat fenomena yang terjadi di kampung tersebut, dengan latar belakang kehidupan ekonomi masyarakat, pendidikan, social budaya dan teknologi. Kampung Asey Kecil ditetapkan sebagai lokasi penelitian karena ada beberapa alasan mendasar yang menarik untuk diteliti (Barnabas Suebu 2007).

5. Instrumen Penelitian

Suatu hasil penelitian dikatakan sasih, jika dilakukan replikasi studi pada suatu kondisi yang sama ternyata hasilnya secara esensial tetap konsisten. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan keberadaan instrument penelitian yang dapat dipercaya. Bila paradigma kuantitatif menggunakan instrument atau alat ukur canggih atau terpercaya, maka paradigma kualitatif juga dapat melatih instrumennya yaitu peneliti sendiri, menjadi lebih percaya termasuk ketersediaan dokumen, buku tulis, ataupun alat bukti lainnya yang otentik. Selain itu, karena penelitian jenis ini menggunakan manusia sebagai instrumen penelitian sehingga ketelitian dan keterbatasan memori memungkinkan instrumen jenis ini bisa menjadi tidak reliabel, maka proses audit perlu dilakukan. Proses audit yang utama dilakukan adalah untuk memeriksa apakah metodologinya telah menunjang penelitian. Agar instrument penelitian reliabel maka ketepatan metodologi penelitian dan penggunaan alat bantu perekam suara atau perekam gambar sangat diperlukan (Moleong, 2000).

6. Penentuan Informan

Didalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, penelitian ini berangkat dari masalah tertentu dalam penulisan yang ada pada situasi kondisi dan realita tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi tetapi ditransferkan ke masalah penelitian pada situasi social yang bersifat nyata. Peneliti memasuki situasi social tertentu, dalam melakukan observasi, wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang data yang dibutuhkan sesuai dengan aspek penelitian Rencana Strategi Pembangunan Kampung terhadap Kinerja Kampung yang tujuannya adalah meningkatkan pembangunan kampung Sugiyono, 2008:216).

7. Jenis dan Sumber Data

Menurut Trauzzi, Basrowi dan Sokidin, (2002), untuk memahami apa yang terjadi pada suatu fenomena, maka perlu metode pengumpulan data diantaranya adalah sumber data penelitian, jenis data penelitian serta teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : **1. Studi Lapangan; a. Observasi, b. Wawancara, c. Dokumentasi;**

a). Observasi (Observation)

Pengamatan secara langsung tentang keadaan, suasana, fenomenan-fenomena serta tingkah laku yang berhubungan dengan masalah penelitian. Adanya pencatatan secara sistematis tentang kejadian-kejadian, obyek-obyek, dan secara umum mengumpulkan data sebanyak mungkin, observasi terfokus pada hal-hal yang

diperlukan dalam penelitian. Menurut Sudarwan Danim (2001:121) penelitian kualitatif berada dilapangan, peneliti kebanyakan berurusan dengan fenomena yang terjadi.

b). Wawancara mendalam (in depth interview)

Lincoln dan Guba (1985:266), teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data secara mendalam dari para informan yang berkompeten. Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data kualitatif dengan menggunakan instrumen yaitu pedoman wawancara. Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan subjek penelitian yang terbatas, sesuai dengan situasi dan kondisi subjek yang terlibat dalam interaksi sosial yang dianggap memiliki pengetahuan, guna mendalami fenomena-fenomena dan mengetahui informasi atau data yang dibutuhkan untuk menjawab fokus penelitian.

c). Studi Dokumentasi (study documentation)

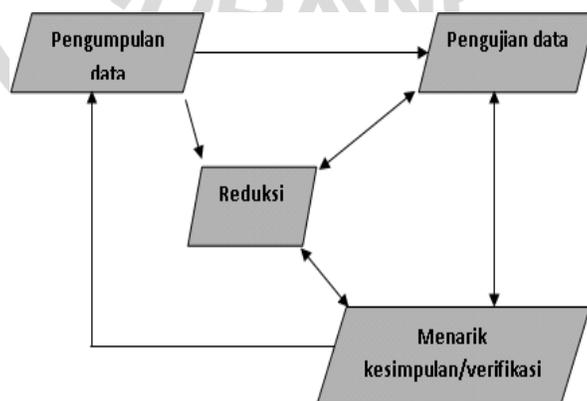
Menghimpun, memeriksa, mencatat dokumen-dokumen yang menjadi sumber data penelitian. Studi dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen baik yang berada di tempat penelitian ataupun yang berada di luar tempat penelitian, yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Arikunto (2006: 132), Teknik ini, merupakan penelaahan terhadap, referensi-referensi yang berhubungan dengan fokus permasalahan penelitian, guna menam bah kepercayaan dalam pembuktian suatu masalah. Patton (1980:137).

8. Teknik Analisis Data

Penelitian Teknik analisis data dilakukan secara mendalam guna menjawab tujuan dari penelitian. Proses analisis data mengacu pada paradigma fenomenologi seperti Husert, Weber, Scutz dan Berger, juga berpijak pada interactive model of analysis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992). Selain itu karena fenomena yang dikaji sesungguhnya tersimpan di alam kesadaran manusia pelakunya yang bergantung pada dunia konseptual, persepsinya, pemahamannya, stok pengetahuannya, maka tanpa memahami fenomena mustahil bisa memahami berbagai data yang diperlukan. Karenanya proses analisis data sangat diperlukan guna menunjang Rencana Strategi Pembangunan Kampung (RESPEK).

Teknik analisa data yang dilakukan oleh peneliti adalah mulai sejak dilapangan maupun setelah data-data dikumpulkan. Semua data yang berhasil dikumpulkan kemudian dilakukan proses pengolahan sehingga menjadi sistematis. Proses pengolahan dimulai dari mengedit data hasil observasi, wawancara, studi dokumentasi, kemudian mengklasifikasikan, mereduksi data-data tersebut sehingga tersusun secara kelompok. Kelompok-kelompok yang telah dikategorikan kemudian diberi simbol-simbol atau kode-kode tertentu dengan maksud agar mempermudah dalam pengendalian data dan penggunaannya setiap saat Faisal, (2003).

Miles dan Huberman menyebutnya model interaktif karena ketiga alur tersebut saling berinteraksi, peneliti harus siap bolak-balik di antara ketiga alur kerja yang dijelaskan. Komponen-komponen analisis data "Model Interaktif menurut Huberman (1992) dalam Sugiono (2',C8:246-247), digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Komponen – Komponen Analisis Data Model Interaktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam memahami permasalahan komponen kampung dalam implementasi pembangunan kampung dijelaskan sebagai berikut.

A. Faktor – Faktor Utama

1. Kebijakan Pemerintah Provinsi Tentang Pemanfaatan Dana RESPEK.

Berdasarkan keterangan data yang berkaitan dengan kurangnya kepedulian kepala kampung terhadap hak-hak komponen kampung dapat dijelaskan bahwa rendahnya rasa keterbukaan dari kepala kampung terhadap komponen kampung tentang berbagai kebijakan pembangunan kampung, sedangkan kepala kampung dalam melaksanakan realisasi pemanfaatan dana RESPEK (rencana strategi pembangunan kampung) dilaksanakan belum sepenuhnya mengacu pada prinsip transparansi dengan melibatkan komponen pembangunan kampung dan toko-toko masyarakat di kampung. Hal ini dapat disimpulkan bahwa hakekat dari wujud hak mengatur pemanfaatan dana RESPEK (rencana strategi pembangunan kampung) oleh pemerintah daerah dalam hal ini kepala kampung masih perlu melibatkan seluruh komponen pemangku kepentingan pembangunan kampung baik mulai dari ondoafi sampai kepada masyarakat.

2. Pengaruh Adat dan Budaya Lokal di Kampung

Dalam mewujudkan pembangunan kampung diharapkan masing-masing kepala kampung agar eksistensinya diakui oleh masyarakat kampung dan pihak luar serta dapat kompetitif dalam persaingan yang sedang terjadi dan ditempuh dengan cara-cara damai serta menghindari konflik. Cara seperti ini memberi dampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat terutama aspek sosial, ekonomi dan pendidikan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam suatu kelompok masyarakat tersebut perlu dipahami secara utuh meliputi norma-norma adat, budaya dan hukumnya yang kemudian berproses memperoleh pengakuan bersama sehingga berkembang menjadi suatu tatanan nilai yang dipatuhi bersama. Pada konteks itulah dijadikan dasar acuan yang perlu di pahami oleh pemerintah sebelum penentuan kebijakan pembangunan pada masa daerah tersebut agar dikemudian hari tidak terjadi permasalahan yang ditinggalkan oleh kebijakan tersebut.

3. Kemampuan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan para informan yang dilaksanakan berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia (aparatur pemerintah kampung) yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pemanfaatan dana RESPEK (rencana strategik pembangunan kampung) dalam menguatkan kapasitas kampung berupa pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kemampuan sumber daya manusia di kampung makin sulit diwujudkan, dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di kampung yang umumnya hanya menamatkan pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), walaupun akhir-akhir ini semakin besar perhatian pemerintah daerah melaksanakan pembangunan dari kampung ke kota dengan menyediakan dana yang cukup besar. Intinya disini Rencana Strategi Pembangunan Kampung tidak di tunjang dengan sumber daya manusia yang memadai di Kampung Asey Kecil.

4. Rasa Kepedulian dan Tanggung Jawab Tinggi dari Ondoafi terhadap masyarakat di kampung.

Fakta-fakta yang digali dari studi mendalam berkaitan dengan rasa kepedulian dan tanggung jawab ondoafi dalam kaitannya dengan kewenangan implementasi kebijakan pembangunan di kampung belum berjalan dengan baik hal ini dikarenakan masih kuat dan atau berlakunya budaya lokal di daerah Kabupaten Jayapura pada umum dan khususnya Kampung Asey Kecil tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dikatakan bahwa status dan kedudukan pimpinan informal sebagai Ondoafi *Matahari*, (*tu no*) atau ondoafi besar dalam tatanan masyarakat hukum adat di Sentani yang sangat dijunjung, dihormati dan disanjung oleh masyarakat adalah merupakan suatu pengaruh dan kekuatan dalam mengayomi masyarakat untuk mewujudkan proses pembangunan di kampung. Dengan memposisikan kepala adat sebagai kepala kampung, dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang kuat bagi tingginya partisipasi komponen kampung dalam mendukung jalannya roda pemerintah dan suksesnya pembangunan di kampung dalam hasil wawancara mendalam belum menunjukkan perkembangan yang berarti, dikarenakan tidak ada komunikasi yang baik antara pemerintah dan pimpinan informal/ondoafi.

5. Kurangnya Keterbukaan Kepala Kampung Terhadap Ondoafi dan Masyarakat Tentang Program RESPEK.

Berbagai informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan sebagaimana diuraikan dalam matriks tabel 6.1 yang dikomentari oleh 7 (tujuh) orang informan mengatakan bahwa dalam implementasi program pembangunan dikampung terkadang kurang adanya keterbukaan atau transparansi dari kepala kampung hal tersebut menggambarkan bahwa lemahnya koordinasi dan komunikasi diantara komponen kampung. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam kepemimpinan masing-masing tokoh di kampung dan pemerintah agar ada niat baik untuk tidak saling menyalahkan dan dapat dikatakan bahwa peluang untuk kolaborasi antara komponen pembangunan kampung tersebut sangat terbuka demi mewujudkan suatu misi bersama dalam mensejahterakan masyarakat kampung Asei Kecil.

6. Tugas dan fungsi dari masing-masing komponen kampung belum dipahami, karena kepala kampung tidak memberikan penjelasan.

Berdasarkan rekaman (data) yang berkaitan dengan tugas dan fungsi komponen pembangunan kampung dari informan lebih fokus pada hal-hal bersifat keterbukaan dalam melibatkan diri secara langsung dalam proses pembangunan kampung. Tetapi kenyatannya pada saat dana RESPEK diturunkan komponen pembangunan kampung tidak mengetahui tugas dan fungsinya, akibatnya secara tidak langsung mereka tidak melibatkan diri dalam proses pembangunan kampung.

7. Adanya sistem tiga tungku di kampung (pemerintah, ondoafi dan tokoh agama).

Berdasarkan hasil wawancara yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah tentang tiga tungku di kampung dapat disimpulkan bahwa perlu adanya suatu kebijakan pemerintah yang mengatur dengan jelas tentang sistem pemerintah tiga tungku di kampung. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam mengkonfigurasi visi Gubernur Papua saat ini yakni fungsi-fungsi pemerintah diperankan oleh 3 (tiga) pihak dengan batas-batas kewenangannya masing-masing yaitu: kepala kampung dan perangkatnya, ondoafi (kepala adat) dan pemerintah agar dapat berperan sebagai mediator dalam pembangunan kampung dengan mengakomodasi asal-usul dan adat-adat masyarakat setempat yang dapat disosialisasikan kepada masyarakat kampung, agar dapat memahami Rencana Strategi Pembangunan Kampung (RESPEK).

B. Faktor – Faktor Pendukung

1. Adanya perlakuan sikap yang kurang terbuka dari kepala kampung terhadap hak-hak komponen pembangunan kampung.

Berdasarkan hasil wawancara dari informan dalam hal ini ondoafi yang berkaitan dengan kurangnya kepedulian kepala kampung terhadap komponen pembangunan kampung dapat dijelaskan bahwa rendahnya rasa keterbukaan dari kepala kampung terhadap komponen pembangunan kampung tentang berbagai kebijakan pembangunan kampung. Hal ini dapat dibuktikan dengan kurangnya kepedulian kepala kampung tersebut mengakibatkan perencanaan program pembangunan maupun implementasi terhadap realisasi pemanfaatan dana RESPEK (rencana strategis pembangunan kampung) yang dirasakan belum sepenuhnya mengacu pada prinsip transparansi dari kepala kampung dengan melibatkan komponen pembangunan kampung.

2. Unsur nilai kebersamaan dalam rangka pembangunan kampung semakin menurun diakibatkan kurangnya keterbukaan kepala kampung.

Berdasarkan hasil rekaman (data) yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah tentang keberhasilan pembangunan dikampung. Unsur nilai kebersamaan dalam pembangunan kampung belum dimiliki segenap komponen pembangunan kampung, hal ini disebabkan oleh kurangnya keterbukaan atau transparansi dari kepala kampung. Sehingga unsur nilai kebersamaan yang diharapkan dalam pembangunan kampung tidak nampak. Disamping itu ditunjang dengan ego yang tinggi dari kepala kampung yang menunjukkan bahwa antara kepala kampung komponen pembangunan kampung terkesan masih mempertahankan kewibawaannya sehingga kurang adanya komunikasi yang baik diantara tokoh-tokoh tersebut walaupun diakui bahwa ada niat baik dari masing-masing komponen untuk bekerja sama dalam perencanaan dan implementasi program pembangunan di kampung.

3. Pengaruh lingkungan terhadap Kepala Kampung dalam bekerja sama.

Fakta-fakta yang digali dari studi adanya pengaruh lingkungan terhadap kepala kampung untuk bekerja sama serta adanya kelompok tertentu yang mempengaruhi kinerja kepala kampung. Hal ini dapat dilihat dari terlambatnya program pembangunan di kampung. Sementara belum berjalan dengan baik sistem koordinasi dan komunikasi yang baik antara komponen pembangunan kampung dan kepala kampung, hal ini dapat dibuktikan pada waktu pencairan dana maupun pelaksanaan kegiatan pembangunan di kampung.

4. Rendahnya kepedulian Ondoafi terhadap program Baperkam dan kepala kampung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang berkaitan dengan kepedulian ondoafi dengan program Baperkam dan aparat kampung dapat dijelaskan bahwa ondoafi tidak pernah mempersoalkan program perencanaan yang dibuat oleh kepala kampung dengan Baperkam, karena merasa kurangnya koordinasi dan komunikasi yang baik. Hal ini dikarenakan belum berjalannya sistem koordinasi, dalam merekrut anggota Baperkam di kampung. Sejalan dengan itu, maka kinerja orang-orang yang dipilih oleh kepala kampung untuk duduk dalam badan perencanaan pembangunan kampung (Baperkam) rata-rata tidak memiliki tingkat pendidikan dan pengalaman bekerja yang memadai dalam menterjemahkan isu-isu strategis pembangunan kampung.

5. Lemahnya fungsi lembaga adat dikampung Asei Kecil.

Berdasarkan hasil wawancara dan studi dari informan berjumlah 15 orang baik yang ada di kampung Asei Kecil maupun informan yang berada diluar kampung Asei Kecil sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 6.2 dari matriks informasi hasil wawancara, dimana terlihat bahwa seluruh informan memberikan tanggapan tentang hal dimaksud. Para pemimpin dan masyarakat menyadari sepenuhnya bahwa untuk mencapai kesuksesan perlu dijalankan fungsi manajemen dalam struktur pemerintah adat yang merupakan penggerak pembangunan di kampung. Mengacu pada filosofi masyarakat suku Sentani yaitu *Kena Embai Umbai* yang artinya Satu Hati Satu Jiwa, hal ini menjadi dasar bagi masyarakat suku Sentani bahwa dalam upaya mewujudkan suatu tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan yang otonom di tingkat kampung berdasarkan pada komunitas lokal yang terbentuk melalui *kesatuan masyarakat hukum* adat. Kesatuan masyarakat adat yang membentuk kesatuan masyarakat hukum adat di tingkat kampung, yang dibangun berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun diatas suatu wilayah adat yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam didalam dan diatasnya. Budaya masyarakat suku Sentani sudah dikenal sejak zaman pemerintah Belanda, dimana budaya tersebut dikenal menyatu dengan tatanan kehidupan masyarakat setempat seperti bahasa Sentani, seni dan tari-tarian, keterampilan mengukur, pembuatan perahu tradisional, menotok dan mengolah sagu, dan budaya gotong royong. Nilai-nilai tersebut perlu untuk dipertahankan karena merupakan warisan berharga yang perlu dijaga dan dilestarikan. Disamping itu dapat dibuktikan bahwa lemahnya fungsi lembaga adat kampung Asei Kecil. Hal ini menyebabkan sehingga kepala kampung tidak dapat berkomunikasi dengan lembaga adat tentang Rencana Strategi Pembangunan Kampung dan imbasnya sampai kepada komponen pembangunan kampung yang lainnya. Harapan yang diharapkan dari pemerintah adalah bagaimana unsur nilai kebersamaan harus diciptakan diantara komponen pembangunan kampung agar nantinya apa yang diharapkan dapat tercapai sesuai aspirasi masyarakat kampung yang dapat ditunjang dengan program pemerintah.

6. Diperlukan strategi kemitraan atau partnership strategi serta penerapan unsur nilai kebersamaan yang tepat dalam mensinkronkan kepala kampung dan komponen kampung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tentang poin 1 sampai 5, maka kami dapat menyimpulkan bahwa mengapa Rencana Strategi Pembangunan Kampung yang dicanangkan Pemerintah Daerah tidak maksimal. Hal ini disebabkan karena strategi kemitraan atau partnership strategi serta unsur nilai kebersamaan belum dimiliki oleh setiap komponen pembangunan kampung yang berdomisili di Kampung Asei Kecil.

Berdasarkan pada faktor - faktor utama dan faktor – faktor pendukung diatas maka perlu jelaskan lebih spesifik berkaitan dengan tujuan utama dari penelitian ini, yaitu:

- a). Memahami peran masing-masing komponen pembangunan kampung dalam aktifitas perencanaan pembangunan di Kampung Asei Kecil Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.

- b). Memahami hakekat dari masing-masing komponen pembangunan kampung terhadap implementasi program pembangunan di Kampung Asei Kecil, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.
- c). Membangun suatu strategi kemitraan atau partnership strategi yang sinergis berazaskan pada unsur nilai kebersamaan serta persaudaraan yang rukun komponen pembangunan Kampung Asei Kecil, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.

C. Peran Kepala Kampung dalam Pelaksanaan Program RESPEK

Peran dari seorang kepala kampung adalah merupakan suatu legitimasi formal yang dipercayakan pemerintah dalam menjalankan seluruh aktifitas pemerintahan di bidang administrasi dan pembangunan yang ditunjang dengan sejumlah fasilitas dan dana dari pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Distrik. Kampung Asei Kecil merupakan salah satu dari tujuh kampung yang terdapat di Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. Data yang diperoleh dari beberapa orang informan tentang peran kepala kampung terhadap berbagai aktivitas pembangunan di Kampung Asei Kecil terutama bagaimana peran dari kepala kampung dalam upaya untuk memberikan motivasi dan semangat serta membangun partisipasi komponen kampung untuk terlibat dalam berbagai aktivitas pembangunan di kampung dirasakan belum maksimal. Hal inilah yang merupakan suatu kelemahan dari seorang kepala kampung, karena keterbatasan SDM berupa pendidikan formal maupun informal dalam bentuk kursus-kursus dan pelatihan kepemimpinan yang mungkin diperoleh hanya ketika seseorang akan dilantik menjadi kepala kampung. Selain itu rasa keberpihakan dan tanggung jawab yang belum diwujudkan secara optimal oleh seorang kepala kampung dalam kepeduliannya terhadap masyarakat dan kampungnya menyebabkan keinginan untuk membawa diri bekerja sama dengan ondoafi dalam membangun suatu pola pemerintah yang sinergis demi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan belum nampak oleh masyarakat. Kelemahan-kelemahan seperti inilah yang belum diantisipasi secara terencana oleh pemerintah Distrik maupun Kabupaten, sehingga dalam implementasi pemerintah sebagai seorang pimpinan di tingkat kampung sangat terasa bahwa kelemahan dari seorang pimpinan dalam menterjemahkan berbagai kebijakan dalam program pembangunan sangat lamban dan terkesan tidak berjalan. Kondisi yang demikian dirasakan dan dialami oleh masyarakat di Kampung Asei Kecil secara khusus bahkan kondisi demikian umumnya terjadi hampir di seluruh kampung di Papua, dimana dana Respek yang begitu besar dari 100 – 400 juta rupiah yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi untuk setiap kampung di Papua mulai dari 2007 – 2010, dan implementasinya masih jauh dari apa yang menjadi harapan pemerintah karena masyarakat 75% - 80% yang tinggal di kampung masih tergolong miskin.

D. Peran Ondoafi Terhadap Pelaksanaan Program RESPEK

Peran pimpinan informal atau Ondoafi terhadap efektivitas Pembangunan di kampung sangat ditentukan oleh seberapa banyak power (kekuasaan) yang dipercayakan atau diberikan oleh kepala kampung, karena selama pemerintah diarah kampung tidak pernah melibatkan pimpinan adat dalam proses perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring dan evaluasi terhadap program yang di laksanakan di kampung, maka untuk seorang figur Ondoafi yang dalam pandangan masyarakat penuh dengan kharisma, kewibawaan, ketulusan, kebaikan, kepintaran, dan kebijaksanaan dalam mengayomi masyarakatnya akan dengan suka cita mencurahkan seluruh perhatian, tenaga dan daya yang ada padanya untuk berperan seefektif mungkin dalam mendukung proses Pembangunan di kampung. Ada persepsi yang keliru dari aparat pemerintah yang ada di kampung terhadap pemilihan *power* yang besar, dari seorang tokoh Ondoafi lalu kemudian menghubungkannya sebagai suatu hal yang negatif, karena mengkaitkannya dengan dominasi dan kekuasaan. Akan tetapi sesungguhnya tidak demikian sifat-sifat kepemimpinan yang dimiliki oleh ondoafi yang bersumber pada Filosofi masyarakat Suku Sentani yaitu *Kena Embai Umbai* yang artinya Satu Hati Satu Jiwa, dimana filosofi ini juga berlaku untuk kepemimpinan Ondoafi di Kampung Asei Kecil, dan didasari dengan 12 Amanat Adat suku Sentani.

Berkenaan dengan hal tersebut, terbukti dari pengamatan peneliti pada waktu menghadiri suatu pertemuan adat di Kampung Asei Kecil, pada tanggal **14 Maret 2011**, dimana dalam pertemuan tersebut ketika hampir seluruh strata kepemimpinan adat telah hadir termasuk Ondoafi juga sudah hadir, akan tetapi pada waktu itu belum hadir seorang tokoh yang berstatus sebagai "*Abu Apha*", maka pertemuan tersebut tidak bisa dibuka atau dimulai karena yang bertanggung jawab untuk membuka suatu acara adat berdasarkan pada struktur adat adalah tokoh "*Abu Apha*". Dalam struktur adat tugas dan fungsi seorang tokoh "*Abu Apha*" adalah mengatur semua urusan di dalam kampung, termasuk membuka dan menutup suatu pertemuan adat di kampung, jadi bukan Ondoafi yang membuka ataupun menutup suatu pertemuan adat.

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan para Koseru (kepala suku) dan Abu Apha tentang keterlibatan maupun aktifitas pimpinan informal mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan terhadap program, tetapi bagaimanapun dalam membuat kebijakan untuk kepentingan publik semestinya pemerintah melibatkan informal dan warga masyarakat. Jika tidak, suatu gejolak sosial akan terjadi terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Contoh sederhana dari produk kebijakan yang sangat kontra di masyarakat sebagai akibat pemerintah senantiasa kurang membuka diri untuk melibatkan pimpinan informal (ondoapi) dalam berbagai perencanaan pembangunan masyarakat maupun dalam membuat kebijakan di kampung, akibatnya masyarakat pun ikut tidak peduli dengan kepemimpinan yang ada. Pemberdayaan partisipasi masyarakat sipil atau '*civil society*' akan alat ampuh dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan pada masa-masa mendatang, keterlibatan ini akan memberikan dampak yang positif terhadap keputusan dan kebijakan yang diambil atau yang akan di implementasikan, karena dapat membangun sinergis antara pemerintah, pimpinan informal dan masyarakat itu sendiri.

Sehubungan dengan masalah tersebut peneliti pernah mewawancarai beberapa tokoh masyarakat yaitu Yansen Marweri yang mengatakan bahwa : "Kepala kampung kalau mau buat program itu sendiri-sendiri atau biasanya beliau menghubungi orang-orang dekatnya kemudian mereka duduk bersama merencanakan program apa yang menurut mereka mudah dilaksanakan. Tetapi umumnya kami selaku masyarakat tidak mengetahui program apa yang direncanakan kepada kampung dan rekan-rekannya. Jadi seolah-olah terkesan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di kampung itu, programnya dari pemerintah Distrik atau Kabupaten, bukan dari suatu aspirasi yang lahir dari masyarakat di kampung". (Wawancara tanggal 8 Maret 2011). Hal ini menunjukkan bahwa peran dari seorang tokoh Ondoafi sebagai pimpinan adat di Kampung Asei Kecil sejauh pengamatan dan juga hasil wawancara langsung dengan beberapa tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan juga aparat pemerintahan di kampung umumnya mengatakan bahwa bapak Ondoafi pada prinsipnya selalu mendukung setiap pelaksanaan program pembangunan di kampung. Hal ini seperti yang dikomentari oleh Sekertaris Kampung dan Kaur Pemerintahan Marten Luter Marwed dan Lukas Tungkoye yang disampaikan kepada peneliti di rumah kediamannya sekretaris Kampung Asei Kecil antara lain mereka katakan bahwa Ondoafi itu orangnya semangat dan selalu terlibat dalam setiap aktifitas pembangunan di kampung, apakah pembangunan fisik, ekonomi, maupun sosial budaya dan keagamaan.

E. Peran Komponen Kampung Terhadap Rencana Strategi Pembangunan Kampung (Respek) Di Kampung Asei Kecil.

Peran komponen kampung terhadap Rencana Strategi Pembangunan Kampung memang sangat diharapkan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga laporan pertanggung jawaban, mengapa dikatakan demikian karena pembangunan kampung tanpa komponen kampung tidak akan berjalan secara maksimal. tetapi kenyataannya komponen kampung yang ada tidak melibatkan diri secara langsung dalam pembangunan karena ada miskomunikasi antara kepala kampung terhadap okdoafi juga ondoafi terhadap pemerintah dalam hal ini pihak pemberian program Respek tersebut. Akibatnya pembangunan kampung yang diharapkan tidak maksimal dilakukan serta tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat kampung Asei Kecil. Harapan pemerintah dalam hal ini efektifitas komponen kampung sangat diharapkan sebagai penyelenggaraan pemerintahan agar dapat mengimplementasi program pembangunan sehingga dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintahan kampung sebagai organisasi publik harus mampu melayani kepentingan masyarakat secara profesional dan proposional.

Dalam membangun tatanan kehidupan masyarakat kampung yang tergolong tradisional dengan kearifan budaya yang masih dominan kepada suatu pola kehidupan moderen yang penuh dengan berbagai dinamika dan tantangan untuk mampu menghadapi berbagai permasalahan seperti : pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial budaya, terkadang memerlukan suatu pengorbanan dan kerja keras dari seorang pemimpin. Untuk dapat mengsikapi hal ini, sedapat mungkin tidak terjadi krisis kepercayaan dari masyarakat yang akhirnya dapat menimbulkan gesekan-gesekan sosial antar masyarakat dengan pimpinan maupun gesekan antara pimpinan dengan pimpinan sehingga dapat menimbulkan lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap pimpinan.

Pengaruh budaya lokal terhadap birokrasi pemerintah kampung menurut, Edgar H. Schein, (2004) mengatakan bahwa budaya organisasi merupakan suatu pola dari seperangkat asumsi-asumsi dasar yang digunakan oleh anggotanya dalam

menyelesaikan masalah-masalah adaptasi internal dan external yang berhasil dengan baik dan dianggap sah. Sedangkan Andrew D. Brown, yang mengutip pendapat (Tumstall, 1983:15) menyatakan bahwa budaya organisasi merupakan suatu konstilasi dari keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, sistem nilai-nilai, norma-norma perilaku merupakan suatu cara-cara yang unik pada organisasi, kemudian budaya organisasi tersebut menjadi pola pelaksanaan kegiatan dan tindakan di dalam organisasi. Robert G. Owens dalam Winardi, (2009: 280), mengatakan budaya adalah suatu cara yang digunakan dalam pemecahan masalah dalam organisasi, baik intern maupun extern yang mencakup: filisofi, idiologi, values, asumsi, keyakinan, harapan sikap dan norma-norma yang dirajut bersama oleh anggota organisasi dan digunakan dalam pembuatan keputusan dan pemecahan masalah. Charles Hampden Tuner, (1994:14), mengatakan bahwa perbedaan dan identitas budaya dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah di berbagai bidang.

Peran komponen kampung terhadap rencana startegi pembangunan kampung, merupakan suatu proses untuk terus mengembangkan organisasi pemerintahan kampung agar mempunyai kemampuan untuk menjawab berbagai tantangan dalam masyarakat sebagai pengguna jasa publik yang dihasilkan oleh organisasi pemerintah di tingkat kampung. Jawaban terhadap berbagai tantangan tersebut berupa kemampuan aparat dan kepala kampung dalam menggerakkan sumber daya yang ada di Kampung Asey Kecil untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Hal itu berhubungan dengan sejauh mana kemampuan aparat kampung dalam memberikan pelayanan dan mengarahkan masyarakat dalam mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kampung. Target akhir dari pelayanan yang disediakan dari pemerintah harus ditujukan untuk mempromosikan kegiatan ekonomi baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun yang dilakukan oleh sektor swasta.

Dalam implementasi pembangunan infrastruktur di kampung, khususnya kegiatan yang mendapat bantuan dari Provinsi atau Kabupaten, seringkali menjadi tidak berguna ketika dukungan pemerintah atau donor selesai. Infrastruktur tersebut lebih sering tidak dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat setempat, sehingga tidak memberi nilai tambah terhadap pembangunan kampung. Kondisi tersebut terjadi karena beberapa faktor: a). Tidak jelasnya visi dan target pembangunan pada pemerintah, b). Tidak jelasnya konsep manajemen pembangunan, c). Tidak ada upaya memperkenalkan rasa percaya diri kepada masyarakat atau berkelanjutan kegiatan ekonomi, d). Tidak ada upaya mobilisasi sumber daya setempat maupun dari luar dengan cara yang terpadu, e). Tidak ada perhatian pada sumber daya pasar (dalam memenuhi permintaan konsumen).

Peran kepala kampung dalam Implementasi kebijakan Otonomi Khusus terhadap pembangunan di kampung harus berjalan dengan baik, dengan memfokuskan pada empat sektor utama pembangunan daerah yaitu: pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi kerakyatan. Untuk menjamin terlaksananya program infrastuktur dasar tersebut di atas, maka pemerintah Provinsi Papua melalui Gubernur Barnabas Suebu, sejak tahun 2007 telah menyalukan dana Respek (Rencana Strategi Pembangunan Kampung) sebesar 100 - 400 juta rupiah untuk setiap kampung. Pengelolaan dana tersebut bukan dilakukan oleh kepala kampung atau badan namun harus dilakukan secara transparan kepada seluruh masyarakat agar setiap orang tahu bahwa dana itu ada dan setiap tahun dana tersebut diberikan. Menurut Suebu, strategi ini akan mempersiapkan masyarakat Papua untuk menerima modemisasi yang sekaligus bisa membawa pembangunan di Papua sama dengan daerah lain di Indonesia. Bahkan dalam masa kampanye pemilihan kepala daerah Provinsi Papua periode 2006 - 2011, dia mempopulerkan Jargon “ **Kaka Bas Pulang Kampung**” Jargon yang menunjukkan perhatian khusus pada masyarakat perkampungan di tanah Papua. Saat terpilih sebagai Gubernur Papua, Barnabas Suebu, mewujudkan dalam bentuk program yang disebut sebagai Strategi Pembangunan Kampung dengan menggunakan pendekatan People Centered Development. Menurut B. Suebu, program Respek di Provinsi Papua perlu dilakukan karena, Pertama : Selama ini pembangunan di Papua bahkan di Indonesia pada umumnya, dirasakan sangat kurang memberikan perhatian kepada masyarakat di desa/kampung. Padahal di kawasan perkampunganlah sebagian masyarakat bermukim, Kedua, sebagian besar orang-orang asli Papua bermukim di kampung-kampung yang sangat terpencil artinya, melaksanakan program Respek sama halnya dengan memenuhi amanat Undang-undang Otonomi Khusus yang paling mendasar, yaitu melakukan semua upaya untuk meningkatkan kesejahteraan orang-orang asli Papua, Ketiga, sampai saat ini Papua jarang sekali memiliki program pembangunan yang melibatkan seluruh masyarakat di semua kampung dan merupakan program rutin setiap tahun anggaran. Karena tanpa upaya yang sistematis demokratis yang meluas dan terus menerus secara berkesinambungan tidak mungkin terjadi suatu perubahan yang berarti pada masyarakat ditingkat kampung, Ke empat: Program Respek adalah upaya strategi untuk mempersiapkan masyarakat Papua memasuki modernisasi akibat

pembangunan berbagai industri yang berbasis pengolahan sumber daya alam. Program Respek tersebut sudah dimulai sejak tahun 2007 yang difokuskan pada 3.642 kampung, 184 kelurahan dan 343 distrik di Provinsi Papua dan Papua Barat.

F. Peran Komponen Kampung Sebelum dan Sesudah RESPEK

a). Peran Komponen Pembangunan Kampung Sebelum Program (Respek)

Pada prinsipnya peran para komponen kampung yang berdomisili di Kampung Asei Kecil sebelum Respek, mereka telah ikut berpartisipasi dalam pembangunan kampung bersama swadaya masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pembangunan dermaga dipinggiran danau sentani tepatnya di pemukiman Telaga Maya, membangun Balai Desa, membangun kantor ondoafi, perbaikan gedung pendidikan, perbaikan puskesmas membangun panti asuhan bagi anak-anak yatim, membangun jalan dan juga terlibat dalam pembangunan rumah warga. Pembangunan ini dilakukan apa adanya sesuai dengan kemampuan warga atau masyarakat Kampung Asei Kecil. Oleh karena itu peran komponen pembangunan kampung sangat diharapkan partisipasinya dalam pembangunan karena mereka merupakan aspek pendukung dalam pembangunan kampung.

b). Peran Komponen Pembangunan Kampung Sesudah Program (Respek)

Berkaitan dengan pembangunan kampung sesudah program Respek, maka secara tidak langsung para komponen pembangunan kampung yang berdomisili di Kampung Asei Kecil ikut terlibat dalam membantu pemerintah guna melaksanakan pembangunan kampung. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya perbaikan pembangunan dermaga dipinggiran danau sentani tepatnya di pemukiman Telaga Maya, perbaikan Balai Desa, membangun kantor ondoafi, perbaikan gedung pendidikan, perbaikan puskesmas membangun panti asuhan bagi anak-anak yatim, membangun jalan aspal, memasang Listrik di Kampung Asei Kecil, dan juga terlibat dalam perbaikan rumah warga yang tidak layak dihuni, pembangunan rumah warga. Pembangunan ini dilakukan apa adanya sesuai dengan kemampuan warga atau masyarakat Kampung Asei Kecil. Karena program Respek tersebut ditunjang dengan dana yang memadai langsung diberikan ke kampung-kampung yang berdomisili di Provinsi Papua. Program Respek yang ditunjang dengan dana tersebut merupakan suatu solusi dalam menyelesaikan masalah pembangunan yang selama ini belum terpecahkan di Kampung Asei Kecil. Menurut kepala kampung Asei Kecil serta ondoafi bahwa dengan adanya program Respek yang ditunjang dengan bantuan dana yang memadai dari Pemerintah Daerah Provinsi Papua sangat meringankan beban dalam melaksanakan pembangunan dapat memecahkan persoalan kami selama ini khususnya di Kampung Asei Kecil Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Provinsi Papua.

G. Dampak RESPEK Terhadap Pembangunan Kampung

Keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh kemampuan dan kapasitas pemerintahan di tingkat distrik dan kampung. Upaya-upaya kearah tersebut dapat dilakukan dengan mendorong SDM pemerintahan di tingkat provinsi Kabupaten/kota untuk secara fungsional bekerja ditingkat distrik dan kampung. Kebijakan ini merupakan salah satu strategi untuk membalikkan piramida birokrasi di Papua yang sekarang ini berbentuk piramida normal. Dengan situasi yang berlimpah dana ini tentu saja masyarakat di kampung dituntut untuk memiliki kapasitas pengelolaan dana yang efektif dan efisien. Hal inilah yang menjadi keraguan banyak pihak terhadap pelaksanaan Program Respek, walau disadari bahwa Respek adalah program yang jelas dan nyata berpihak pada masyarakat asli Papua, namun pengalaman panjang membuktikan bahwa proses perencanaan pembangunan di kampung sudah dimulai sejak masa lembaga ketahanan masyarakat desa (LKMD) hingga era musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrebangdes) serta proses partisipatif yang diterapkan oleh organisasi sosial kemasyarakatan ke tengah-tengah masyarakat di kampung. Dalam pengalamannya masyarakat di kampung merasakan sendiri bagaimana perencanaan yang pemerintah buat sulit terwujud, lebih dari itu program yang dikatakan sebagai program *bottom up* ini tidak lebih dari propaganda pihak-pihak tertentu demi kepentingan sekelompok orang.

Sementara itu, Rektor Uncen, B. Kambuaya, dalam seminar dengan judul : Membedah dan Mengagas 6 tahun Pelaksanaan Otsus Papua, dalam rangka Dies Natalis ke 63 Universitas Cenderawasih di Kampus Fakultas Ekonomi Uncen Waena, Selasa 19 November 2009, mengungkapkan bahwa selama berlangsungnya pemberlakuan Otonomi Khusus

Papua, upaya untuk melakukan pemberdayaan rakyat Papua masih rapuh, sehingga yang harus dilakukan saat ini adalah bagaimana membuat orang Papua bisa kuat dan mampu mandiri. Sebab dengan orang menjadi kuat dan mandiri, maka tentunya mereka dapat terlibat dalam berbagai kegiatan pembangunan. Jika hal tersebut belum dibangun secara baik, maka orang dikasih uang pun selama mereka belum memiliki kapasitas yang baik dalam mengolah uang tersebut, maka uang yang dikasih pun tidak akan ada manfaatnya.

Dalam era Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang dijabarkan oleh Gubernur dalam bentuk program respek serta ditunjang dengan dana yang cukup besar telah menjadi jalan bagi pemerintah tingkat kampung untuk melaksanakan pembangunan di daerahnya sendiri dengan berdasarkan pada potensi-potensi yang ada. Peran kepala kampung terhadap implementasi program pembangunan kampung dimulai dari proses penyusunan, perencanaan anggaran sampai pada pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi ditangani sepenuhnya oleh aparat pemerintahan kampung tanpa melibatkan unsur masyarakat dan adat, sehingga hasilnya belum berdampak langsung dirasakan oleh masyarakat di kampung.

H. Peran Ondoafi Terhadap Rencana Strategi Pembangunan Kampung Di Kampung Asey Kecil.

Peran Ondoapi sebagai pimpinan informal terhadap implementasi program-program pembangunan di Kampung Asey Kecil berdasarkan data dan fakta terhadap berbagai pembangunan antara lain pembangunan dermaga sebagai fasilitas pelabuhan penyeberangan, dimana aktifitas Ondoapi dalam membentuk partisipasi masyarakat bagi pembangunan infrastruktur di kampungnya sebagai berikut : **Pertama** : Timotius Marweri sebagai Ondoafi di Kampung Asey Kecil, sangat menyadari bahwa dirinya telah mempunyai tugas dan “tanggung jawab terhadap warga dan kampungnya. Dengan power yang dimiliki secara legal informal, Ondoafi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab pembangunan infrastruktur dengan memberikan tempat secara cuma-cuma tanpa imbalan apapun dari pemerintah dan mengajak seluruh komponen masyarakat kampung kwadeware untuk bersama-sama menangani pekerjaan pembangunan dermaga sebagai suatu fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. **Kedua**: Keinginan masyarakat yang telah lama terpendam untuk memiliki fasilitas berupa dermaga tempat penyeberangan yang berlokasi di kampung kwadeware sebagai suatu fasilitas yang dapat masyarakat gunakan sebagai terminal tetapi juga sebagai pusat transaksi jual beli hasil kebun dan nelayan antara masyarakat dengan pedagang dari luar, ditanggapi Ondoafi secara responsif. Tindak lanjut keinginan warga tersebut diawali dengan pertemuan dan perencanaan bersama oleh Ondoafi bersama aparat pemerintah dari kabupaten di bantu komponen adat terkait yang di buat secara tertulis meliputi: penyerahan tanah/lokasi, penyiapan tenaga kerja, pembagian tugas dan tanggungjawab, pelaksanaan, pengawasan dan administrasif logistik serta koordinasi dan pengendali. Tahap berikutnya dilaksanakan penunjauan dan pengukuran lokasi oleh aparat dan kabupaten bersama Ondoafi dan para kosero serta masyarakat kampung yang begitu antusias dalam ikut berpartisipasi mengsucceskan program pembangunan dermaga tersebut yang merupakan dambaan seluruh warga kampung kwadeware selama bertahun-tahun. **Ketiga** : Dalam undang-undang Otsus Papua, mengamanatkan bahwa pemerintah, adat dan agama harus menjadi suatu komponen yang utuh dalam membangun kerja sama yang baik sehingga program yang direncanakan adalah benar-benar bersumber dari hasil suatu musyawarah bersama antara pimpinan formal dan informal melatarbelakangi seluruh aspirasi masyarakat kampung. **Keempat**: Ondoafi sangat menyadari bahwa dirinya, tidak dapat melaksanakan sendiri proses pembangunan dermaga ini, walaupun secara faktual dia telah memiliki power untuk melaksanakan, namun naluri kepemimpinannya berkata lain. Bagi Ondoafi, Timotius Marweri, tiada jalan lain untuk menuju sukses kecuali menjadi satu dengan masyarakat untuk menjalankan suatu mini. **Kelima**: Kepentingan kampung hanya dapat di ketahui oleh warga kampung itu sendiri, demikian pendapat Ondoapi sehingga dia begitu yakin bahwa, pembangunan dermaga dan jalan sepanjang 2,5 Km yang menghubungkan jalan umum dengan dermaga tersebut lebih efektif dilaksanakan oleh masyarakat kampung tanpa campur tangan lain dan hal itu telah dibuktikan pads era kepemimpinannya dapat membangun dermaga dan jalan oleh masyarakat demi untuk kepentingan warga sendiri. Ondoafi berpendapat bahwa campur tangan pihak lain akan mengurangi kredibilitas dirinya, sebagai seorang Ondoafi besar yang dikenal dengan sebutan *Ondoafi Matahari*, bisa saja diartikan sebagai seorang pemimpin yang tidak dapat menyelesaikan masalah interen dan kurang mampu memberdayakan warganya sendiri secara tepat guna. **Keenam** : Untuk mengadakan suatu perubahan sosial ekonomi masyarakat di Kampung kwadeware, maka Ondoafi mengerahkan tenaga, pikiran dan waktu, walaupun ditinjau dan perspektif finansial memang tidak ada dana yang dikeluarkan oleh Ondoafi, tetapi kharisma dan kewibawaan yang dimilikinya mampu untuk menggerakkan seluruh masyarakat

melalui koordinasi dan peran serta tanggung jawab dari seorang Notokose/Derekose sebagai penggerak pembangunan untuk menjabarkan semua perencanaan yang dibuat oleh Ondoafi kepada masyarakat, serta membentuk kelompok kerja yang solid untuk melaksanakan kegiatan secara gotong royong. **Ketujuh** Dalam mempelajari situasi dan kondisi kampung, serta tetap berpegang pada strata pemerintahan adat yang berlaku di kampung, selanjutnya Ondoafi membagi tugas kepada seluruh komponen masyarakat dengan melibatkan perangkat kampung, Bamuskam, tokoh agama dan perwakilan warga yang dinilai memiliki kapabilitas, integritas serta loyalitas yang tinggi terhadap kampungnya. Semua yang terkait dengan kegiatan ini secara administratif di buat laporan kemajuan (*progress report*) oleh Notokose/Derekose yang dipercayakan oleh Ondoafi sebagai penggerak dan pengawas pembangunan, dimana dari laporan tersebut merupakan bahan evaluasi sehingga dapat dijadikan pedoman bagi kegiatan serupa dimasa yang akan datang. Dalam pelaksanaan proses pembangunan dermaga ini, pengendalian ada ditangan Ondoafi dengan selalu mengadakan komunikasi dan koordinasi, dengan warga untuk tetap menyamakan persepsi. **Kedelapan**: Pada proses pembangunan ini walaupun tanpa didukung dengan peralatan yang moderen, namun karena semangat dan kerja keras dari masyarakat terlebih dengan selalu hadirnya Ondoafi, mampu memberikan suatu motivasi tersendiri bagi seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam setiap pekerjaan sehingga walaupun di dukung dengan dana dari pemerintah Kabupaten yang memang sejak awal sudah di sampaikan oleh aparat Kabupaten bahwa dana yang tersedia untuk pembangunan dermaga tersebut sangat terbatas, namun pada akhirnya masyarakat dapat menyelesaikan suatu bangunan dermaga dengan ukuran panjang 25 meter dan lebar 6 meter, serta dilengkapi dengan fasilitas ruang tunggu seluas 40 meter yang dalam ukuran masyarakat kampung cukup permanen. **Kesembilan**, Ondoafi juga memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya selama dalam proses pembangunan Jalan dan Dermaga dapat di sampaikan dengan bebas kepada Notokose/Derekose yang kemudian secara organisasi akan diteruskan kepada Ondoafi. Dengan demikian masyarakat dapat melaporkan segala permasalahan yang terjadi di kampung secara langsung maupun tertulis kepada Notokose/Derekose, termasuk perkembangan situasi pasca pembangunan dermaga dan jalan di Kampung kwadeware. **Kesepuluh** : Strategi Ondoafi Timotius Marweri, dalam menyelesaikan proses pembangunan ini lebih berorientasi kepada keberhasilan tugas (*mission oriented*), walaupun dia sebagai seorang Ondoafi besar yang dalam pandangan masyarakat memiliki power dalam pemerintahan yang tidak dapat ditegur oleh siapapun dalam masyarakat, karena dianggap memiliki pancaran atau sinar yang memberi kehidupan bagi semua orang, akan tetapi Ondoafi sangat bijaksana sekali dalam mengayomi dan merangkul masyarakatnya untuk bersama-sama bekerja demi mencapai suatu tujuan.

Sebagai putra asli pewaris keturunan Ondopolo / Ondoafi dari Marga Marweri, maka dalam konteks ini, ada makna penting yang dapat ditarik dari proses pembangunan dermaga, jalan dan jembatan di Kampung Asey Kecil, yaitu Kepemimpinan Ondoafi selalu berorientasi pada kepentingan kampung dan warganya. Dalam mengambil keputusan lebih banyak menggunakan keputusan kolektif yang dirumuskan bersama oleh dewan adat dan komponen masyarakat lainnya. Obsesinya menjadi Ondoafi yang harmonis dan demokratis diimplementasikan dengan konsisten dan bertanggung jawab. Dalam hal ini Ondoafi sangat memperhatikan implementasi kepemimpinannya sebagai suatu hubungan timbal balik dengan selalu mengayomi dan bahkan menjadi pelayan bagi masyarakatnya, hal ini merupakan amanah dari leluhurnya yang dituangkan dalam filosofi masyarakat Suku Sentani yaitu "*Kena Embai Umbai*" yang artinya Satu Hati Satu Jiwa yang kemudian dijabarkan dalam bentuk misi kepemimpinan Ondofolo/Ondoafi untuk seluruh kampung di Sentani bahkan di Kabupaten dan Kota Jayapura yang dijabarkan dalam 12 Amanat Adat. Berangkat dari filosofi dan amanat adat tersebut di atas maka Ondoafi Timotius Marweri, membangun pola kepemimpinannya dengan pola kepemimpinan Hati Nurani. Kepemimpinan dengan hati nurani memberikan suatu kerangka kerja yang memampukan banyak individu untuk dapat memberikan pertolongan dan bantuan dalam memperbaiki kebiasaan masyarakat memperlakukan pihak lain dengan mempedulikan dia sebagai sesama manusia yang hidup dan berkembang dalam suatu lingkungan yang sama, dimana masyarakat perlu mempraktekkan dalam menciptakan pola kerja yang saling melayani antara satu dengan yang lain. Ondoafi dalam mewujudkan harmonisasi sebagai implementasi dari kehidupan bermasyarakat di Kampung kwadeware dapat terwujud.

Hubungan antara pencapaian makna hidup dengan kepemimpinan Ondoafi adalah pada perilaku melayani dari seorang pemimpin pada pengikutnya ataupun pada organisasi. Kehidupan akan sangat menggairahkan serta memuaskan jika tujuan utama dari seorang Ondoafi bukanlah untuk menyenangkan dirinya sendiri atau memenuhi egonya, melainkan lebih pada melakukan sesuatu yang berharga bagi masyarakat atau orang lain, sehingga mereka dapat lebih berkembang menjadi individu dan masyarakat yang lebih baik.

Sejalan dengan hal tersebut Greenleaf, (2002), berpendapat bahwa ditempat kerja perlu diterapkan suatu pola kepemimpinan yang dikenal sebagai Kepemimpinan Pelayan. Greenleaf, menyebutkan bahwa kepemimpinan pelayan adalah suatu model kepemimpinan yang memprioritaskan pelayanan kepada pihak lain, baik kepada karyawan (anggota) perusahaan, pelanggan, maupun kepada masyarakat sekitar. Sementara itu, Spears, (1995), mengatakan bahwa karakteristik utama yang membedakan antara kepemimpinan pelayanan dengan model kepemimpinan lainnya adalah keinginan untuk melayani hadir sebelum adanya keinginan untuk memimpin. Selanjutnya mereka yang memiliki kualitas kepemimpinan akan menjadi pemimpin, sebab itulah cara yang paling efektif untuk melayani. Hal ini terjadi sebagai bagian pemenuhan mini hidup seseorang, yaitu bagaimana memberikan sesuatu yang positif untuk dunia ini dalam upaya menciptakan kondisi dunia yang lebih baik. Seperti ada ungkapan dari Vince Lombardi, yang mengatakan bahwa: *"Pemimpin tidak akan pernah menutupi kesenjangan antara dirinya sendiri dan kelompok. Bila dia menutup kesenjangan itu dia tidak lagi berfungsi seperti apa yang seharusnya. Dia harus meniti tali yang direntangkan antara persetujuan yang harus diperolehnya dan kendali yang harus dia gunakan"*.

Praktek kepemimpinan pelayanan telah dilakukan oleh Ondoafi yang ditandai dengan meningkatnya keinginan untuk melayani masyarakatnya dengan melakukan pendekatan secara menyeluruh pada pekerjaan, komunitas, serta proses pengambilan keputusan yang melibatkan seluruh komponen adat di kampung. Pemimpin pelayan mengenali kehormatan dan pentingnya nilai setiap individu karena mereka adalah ciptaan Tuhan yang mulia, sehingga pemimpin yang melayani merasa berkewajiban untuk terlibat dalam pembentukan para pengikutnya menjadi manusia yang seutuhnya, yaitu dengan menciptakan lingkungan kerja yang mampu memberikan dukungan demi terpenuhnya proses pembentukan tersebut. Implementasi kepemimpinan dengan hati nurani juga terlihat dalam, menyelesaikan kasus-kasus kenakalan remaja, pertikaian dalam rumah tangga, kasus denda akibat perbuatan asusila yang dilakukan oleh warganya, kasus pertikaian antar warga dan lain-lain. Hal ini dapat dilihat dari sikap yang dilaksanakan Ondoafi diawali dari mempelajari situasi setiap permasalahan dengan melihat aspek-aspek yang akan terjadi jika tidak dilakukan tindakan penyelesaian secara cepat dan tepat, dan dalam perjalanan kepemimpinan sebagai Ondoafi belum pernah ada suatu kasus yang diputuskan dengan kekerasan, akan tetapi seluruh kasus yang diputuskan oleh Ondoafi adalah berakhir dengan perdamaian diantara warga atau masyarakat.

Aplikasi "Mengayomi" masyarakat merupakan basis pemikiran Ondoafi dalam bertindak, dan hal ini terlihat dari substansi proses perencanaan pembangunan dermaga dan jalan ada nuansa melindungi serta menjaga kekayaan alam berupa tanah yang dalam pandangan masyarakat Sentani "tanah adalah ibarat seorang Ibu yang menyusui anaknya" atau mementingkan kebutuhan warganya dengan melepaskan areal miliknya sebesar 6 meter X 2,5 Km kepada pemerintah kabupaten secara gratis untuk pembuatan jalan umum dari dermaga ke jalan utama. Kepemimpinan Ondoafi, Timotius Marweri sangat jauh dan *one man show* yang ingin mencari popularitas diri sendiri, dia lebih memilih memberdayakan komponen masyarakat kecil di kampung, yang dinilai oleh Notokose/Derekose mempunyai talenta atau keterampilan sebagai tukang kayu maupun tukang batu serta mampu melaksanakan tanggung jawab yang dipercayakan dalam pekerjaan pembangunan dermaga dan jalan tersebut. Ondoafi bersama-sama Notokose/Derekose tidak pernah melepas tanggung jawab dan senantiasa berada di tengah-tengah warga memberi semangat dan motivasi kepada warga agar terus bekerja dengan giat dan semangat sampai dengan peresmian ke dua pekerjaan tersebut dengan tidak memberikan peluang kemungkinan terjadinya konflik horizontal antar masyarakat kampung.

Dalam menghadapi permasalahan proses pembangunan dermaga dan jalan, secara situasional Ondoafi mengimplementasikan kepemimpinan yang mendukung inspirasi masyarakat, Para kosero dan Notokose/Derekose yang terdapat dalam perangkat adat di kampung dalam arti Supportive (kepemimpinan yang mendukung), kemudian Ondoafi menindak lanjutinya dengan memberikan pengarahan kepada semua pihak yang terkait bagaimana secara operasional mini tersebut dilaksanakan, hal ini diartikan dengan Directive Leadership (kepemimpinan instruktio (House & Michell, 1974). Ondoafi selalu mengikuti kegiatan ini baik langsung maupun tidak langsung dalam arti Participative Leadership (kepemimpinan partisipatif). Pada akhirnya Ondoafi selalu berorientasi kepada keberhasilan bagaimana pembangunan itu dapat berjalan sampai selesai, yang dapat diartikan dengan Achievement leadership (kepemimpinan yang berorientasi kepada keberhasilan). Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Timotius Marweri dengan konsisten dan sabar menahan emosi walaupun banyak tantangan, hal ini relevan dengan Self Leadership (memimpin diri sendiri), dimana perilaku dan pikiran manusia digunakan untuk mempengaruhi dirinya sendiri, karena sebagai seorang pemimpin yang nantinya akan diikuti banyak orang, hendaklah dia mempunyai kesadaran diri yang tinggi tentang siapa diri dia sebenarnya

dan apa kelebihan serta kekurangannya. Seperti ada pepatah mengatakan, “Menaklukkan seribu orang tidaklah sesukar menaklukkan diri anda sendiri”

Relevan dengan proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan dermaga dan jalan di kampung kwadeware, Timotius Marweri, selaku Ondoapi menggunakan dan memberi kepercayaan kepada staf dan warganya yaitu Notokose/Derekose untuk dapat melaksanakan tugas, sebagai orang yang bertanggung jawab penuh terhadap berbagai pembangunan dan ekonomi di kampung, dalam hal ini Ondoapi membantu pengikutnya membangun kemampuan diri sendiri yang dapat diartikan sebagai *Super Leader*, dengan mengimplementasikan *Super Leader* maka muncullah apa yang disebut dengan *Super Leadership* (Manz & Sims, 2001:45).

I. Implementasi Peran Kepala Kampung dalam Proses Pembangunan Kampung

Implementasi kepemimpinan kepala kampung dalam membentuk partisipasi tidak terlepas dari pemahamannya tentang kepemimpinan. Sesuai fakta kepala kampung telah mengimplemetasikan kepemimpinan yang relevan dengan teori dasar kepemimpinan yang berasal dari kata dasar “pimpin” yang artinya bimbing atau tuntun. Dari kata “pimpin” lahirlah kata kerja “memimpin” yang artinya membimbing atau menuntun dan kata benda “pemimpin” yaitu orang yang berfungsi memimpin, atau orang yang membimbing atau menuntun. Didalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam kepustakaan muncullah istilah yang serupa dengan itu dan kadang-kadang dipergunakan silih berganti seakan-akan tidak ada bedanya satu dengan yang lain, yaitu “kepemimpinan” dan “kepemimpinan”. Kosakata tersebut mungkin dapat menimbulkan kecacauan dalam pemikiran yang berakibat tentunya kecacauan dalam tindakan dan perbuatan seseorang dan masyarakat, karena istilah-istilah tersebut masing-masing mempunyai arti sendiri-sendiri (Pamudji, 1993:5).

Dalam aksi interaksi pemimpin dan masyarakatnya akan terdapat kegiatan atau upaya yang dapat menggerakkan orang lain untuk tujuan tertentu, dan posisi yang paling memungkinkan bagi seseorang untuk melakukan membentuk partisipasi masyarakat hanya sebagai pemimpin formal atau informal dalam konteks memimpin. Adapun istilah “pemimpin” berasal dari kata asing “leader” dan “kepemimpinan” dari “leadership”. Sekalipun “kepemimpinan” tidak lama dengan manajemen (*management*) tetapi kedua hal itu tidak dapat dipisahkan. Antara manajemen dengan kepemimpinan dapat dibedakan bahwa kepemimpinan itu nuansanya mengarah kepada kemampuan individu, yaitu kemampuan dari seorang pemimpin, sedangkan *management* mengarah pada sistem dan mekanisme kerja dari kepemimpinan yang merupakan suatu gambaran hubungan atau interaksi antara si pemimpin dan pengikut dalam suatu organisasi sedangkan manajemen merupakan fungsi status atau wewenang (*authority*); jadi kepemimpinan menekankan pada pengaruh terhadap pengikut (wibawa) sedangkan manajemen lebih menekankan pada wewenang yang ada, selanjutnya kepemimpinan menggantungkan diri pada sumber-sumber yang ada dalam dirinya (kemampuan dan kesanggupan) untuk mencapai tujuan, sedangkan manajemen mempunyai kesempatan untuk mengarahkan dana dan biaya (*funds and forces*) yang ada, didalam organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif, kepemimpinan diarahkan untuk mewujudkan keinginan si pemimpin, walaupun akhirnya juga mengarahkan tercapainya tujuan organisasi, sedangkan manajemen mengarahkan kepada tercapainya tujuan organisasi secara langsung, dan kepemimpinan lebih bersifat hubungan personal yang berpusat pada diri si pemimpin, pengikut, dan situasi, sedangkan manajemen bersifat impersonal dengan masukan (input logika, rasio, dana, analitis dan kuantitatif). Walaupun kedua gal tersebut (kepemimpinan dan manajemen) berbeda, tetapi mereka tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kalau diperhatikan berbagai macam definisi tentang manajemen yang intinya menyatakan “*getting the work done through others efficiently and effectively*” maka jelaskan bahwa manajemen itu merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pimpinan (managers) untuk mengerahkan, menggerakkan dan mengarahkan segala sumber (dana dan daya) untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dalam hubungan dengan kepemimpinan relevansi *management*, kepala kampung telah melaksanakan fungsi manajemen yaitu *actuating*, dalam hal ini sesuai data penelitian kepala kampung melaksanakan aktivitas bersama warganya dan menyelesaikan permasalahan pembangunan di kampung dan melaksanakan fungsi kontrol (*controlling*) terhadap hasil yang telah dicapai. Dalam konteks ini sesuai dengan pendapat George R. Terry (1964:3) dan Pamudji (1993:7) tentang fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari *planning, organizing, actuating dan controlling*, maka fungsi *actuating* itulah yang didalamnya mengandung *leadership* (kepemimpinan) yang kemudian merasuk kedalam fungsi-fungsi lainnya. Lebih tegas lagi dinyatakan bahwa sarana-sarana (*tolls*) untuk menggerakkan (*actuating*) itu ialah : kepemimpinan (*leadership*), hubungan manusiawi (*human relations*) dan komunikasi (*communication*).

Dalam membentuk partisipasi masyarakat terhadap pembangunan kampung sama halnya dengan menggerakkan pikiran dan tenaga manusia yang tentunya memerlukan suatu peran tersendiri, hal ini lebih dikenal dengan kepemimpinan. Kepemimpinan adalah salah satu sarana dalam menggerakkan (*actuating*) dan terakhir adalah salah satu fungsi manajemen (*management*), sehingga wajarlah apabila kepemimpinan itu harus dipelajari oleh pejabat pimpinan (*managers*). Sementara itu G. R. Terry (1977:81-87) keduanya mengungkapkan pendapat yang senada bahwa fungsi-fungsi manajemen meliputi empat peristiwa yang disingkat P.O.A.C, yaitu Planning (rencana), Organizing (pengorganisasian), Actuating (penggerak/aktualisasi), dan Control (pengawasan). Pendapat lain tentang kepemimpinan yang dinyatakan oleh Stogdill (1976:7-8) bahwa kepemimpinan sebagai titik pusat proses-proses kelompok: (*leadership as a focus of group processes*) dan kepemimpinan adalah suatu kepribadian yang mempunyai pengaruh (*leadership as personality and its effects*). Dan akhirnya bagi Bennis (1959:4, 259-301) "*leaders can be defined as the process by which an agent induces subordinate to behave in a desired manner*" (kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai proses dengan mana pemimpin mendorong mempengaruhi bawahan untuk berperilaku seperti yang dikehendaki). Hal ini dapat dikritisi adanya kecenderungan melihat kepemimpinan sebagai usaha yang terselubung untuk mempengaruhi dan sebagai suatu sarana untuk membentuk kelompok sesuai kemauan pemimpin dan kurang mengakui hak-hak, keinginan-keinginan dan kebutuhan-kebutuhan anggota kelompok atau norma-norma dan tradisi kelompok, selanjutnya mendapat reaksi negatif yang kuat dan golongan yang menentang perilaku pimpinan yang kemungkinan otoriter. Masih dalam konteks peran kepemimpinan, seperti yang diungkapkan oleh Veithzal Rivai, (2008:148), peran kepemimpinan dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya sebagai pimpinan.

Untuk memperoleh gambaran yang cukup tentang kepemimpinan kepala kampung dalam membentuk partisipasi masyarakat kampung kwadeware, dipandang perlu disajikan 3 kasus sebagai isu yang signifikan dalam fokus penelitian ini yaitu, permasalahan adanya dualisme kepemimpinan sehingga terjadi konflik antara pimpinan formal (kepala kampung) dan pimpinan informal (ondoapi), peran pimpinan formal (kepala kampung) dan pimpinan informal (ondoapi) terhadap aktifitas pembangunan, infrastruktur di kampung kwadeware, dan peran pimpinan formal (kepala kampung) dan pimpinan informal (ondoapi) terhadap implementasi pembangunan infrastruktur di kampung kwadeware berupa dermaga, jalan dan jembatan serta membangun kepemimpinan kampung yang sinergis antara kedua pemimpin formal dan informal di kampung kwadeware.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Abtony Bebbington, Leni Darmawan 2006, Kapasitas lokal pemerintahan kampung dan politik ekonomi pembangunan kampung di Indonesia.
- [2]. Agus Purbathin Hadi 1993, Pengembangan program pembangunan perdesaan.
- [3]. Akbar Silo, 2006, Jurnal Formulasi Model Sistem Pemerintahan Kampung Menuju Kemandirian, Agung Jakarta.
- [4]. Albert park 2010, Pembangunan Berbasis Masyarakat dan pengentasan kemiskinan di desa china.
- [5]. Anonymous, 2006, Jurnal, Pembaharuan Tatakelolah Pemerintahan Kampung Berbasis Kemitraan di Provinsi Papua.
- [6]. Anthony Bebbington, Scot Guggenhein, Jurnal Local Capacity Village Governance and Political Economy of Rural Development in Indonesia.
- [7]. Arief Furchan. 1992. Pengantar Metode Penelitian Kualitatif. Surabaya: Usaha Nasional
- [8]. Arikunto, Suharsini, 1993, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek. Penerbit Rineke Cipta. Jakarta.
- [9]. Arya Hadi Dharmawan, 2006 Jurnal Otoritas Kelembagaan Sosial Dalam Reformasi Tata kelolah Pemerintahan Desa : Investigasi Teoritik dan Empirik.
- [10]. August Ferdinand, Metode Penelitian Manajemen Pedoman Penelitian Untuk Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Ilmu Manajemen.
- [11]. Barnabas Suebu, Akademik UNCEN 2005, Pemberlakuan Undang-Undang No. 21 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua.
- [12]. Miles M. Huberman A. Michael, 2009, Analisis Data Kualitatif Rineke Cipta, Jakarta.
- [13]. Barnabas Suebu 2007, Rencana Strategi Pembangunan Kampung Provinsi Papua.
- [14]. Basrowi & Suwandi, 2008. Memahami Penelitian Kualitatif, Rineke Cipta, Jakarta
- [15]. Bernard, H. Russel, 1994 "Methods Belong to All of Us", dalam Robert Borofsky (peny.) Assessing Cultural Anthropology, New York: McGraw-Hill, Inc hlm.168-179.
- [16]. Bintaro Tjokroamidjojo, 1974, Pengantar Administrasi Pembangunan Penerbit LP3ES Jakarta, Cetakan Pertama.
- [17]. Boediono, 1993; Sumadinigrat Hannawan, 1993 Respek merupakan kebijakan pembangunan.
- [18]. Burhan Bungin, 2011, Buku Metodologi Penelitian Kualitatif.
- [19]. Denzlim, Norman K & Lincoln, 1994. Handbook of Qualitative Research California Amerika : Sage Publication, Inc.
- [20]. Denim, Sudarwan. 2002. Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- [21]. Davi Prasnowo Darminto; Rifka Julianty 2002;52 Buku Manajemen Strategi tentang Konsep Analisis Strategi
- [22]. Dhanax Xaehariar, Soedjatmoko., Donald K. Emmerson, M.M. Billah, Ph. Quarles Van Offord, Arier Kristyanto, John Ihallauw, 1984, Metpen Pedesaan Koresksi dan Pembeneran. Engless Ruswarno; 2009, Buku Fenomenologi.
- [23]. Gary Hamid C.K. Prahalad, Howard Thomas dan Don O'Neal, 1998, Strategi Flexibility, Managing in A Turbulent Environment
- [24]. Ginandjar Kartasasmita, 1997. Pemberdayaan Masyarakat Konsep Pembangunan Berakar pada Masyarakat.
- [25]. Gempur Santoso, 2007. Fundamental Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- [26]. Hary Hikmat Tumpal Saragi 2003, Pengembangan Program Pembangunan Partisipatif.
- [27]. H. Ismail Nawaiwi, 2006, Pembangunan dan Problem Masyarakat.
- [28]. Hadi, Hayati 2003 Pendanaan Pembangunan Kampung Terprogram sesuai Undang-Undang.
- [29]. Hans Martin Lonngren (2010) Aggregated construction supply chains: success factors in implementation ofvstrategic partnerships (Faktor Keberhasilan Dalam Pelaksanaan Kemitraan Strategis.
- [30]. Ismael Omar, Hajjah Asiah Othman, 2009. Jurnal Strengthening the Structure of Development Land Market in Kampong Baru, Kuala Lumpur.
- [31]. Jeffry Hc Fyer Down Sung Chio 2000, Jurnal Strategi Kemitraan atau Partnership dalam pembangunan kampung.
- [32]. Mansoben 1995, Pola kepemimpinan Mempengaruhi Aktivitas kelompok Masyarakat Kampung.
- [33]. James P. Spradley, 1997. Jurnal Metode Etnografi, PT. Tiara Wacana Yogyakarta.
- [34]. John Robert Wing, 1994. Jurnal Irian Jaya Development and Indigenous Welfare. Infrastructure Acces and Quality on-farm Enterprised in Rural Indonesia.
- [35]. John Gibson, Susan Olivia, 2009. Jurnal The Effect of Infrastructure Acces and Quality on-farm Enterprised in Rural Indonesia.
- [36]. Kristiadi JB, 1998; Sjahfrizal, 1984 Upaya Pemerintah dalam pembangunan kampung sejalan dengan Konsepsi Pembangunan GBHN 1993.
- [37]. Lexi Moleong, 2000, Metodologi Penelitian, cet.13, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- [38]. Maija Leena Huotari (2004), Knowledge processes A strategic foundation for the partnership between the university and its library Maija-Leena Huotari